



Dimensi *Policy Network* dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar, Provinsi Riau

Ema Fitri Lubis¹ Sujianto² Febri Yuliani³ Auradian Marta⁴

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,
ema.fitri7494@grad.unri.ac.id, sujianto@lecture.uinri.ac.id, febri.yuliani@lecture.unri.ac.id,
auradian.marta@lecture.unri.ac.id

Received : July 7, 2025; Accepted : Oct 30, 2025
DOI 10.25299/jiap.2025.23810

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Minapolitan area development policy in Koto Mesjid Village, XIII Koto Kampar, Riau Province, through a policy network approach. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, documentation, and questionnaires. The results show that the Minapolitan policy involves actors from various sectors: government, community, private sector, NGOs, and academics. This study uses Van Waarden's seven dimensions to examine policy networks, including: actors, which include individuals and groups with an interest in the policy-making process. The second indicator concerns the role of actors in the policy network. The third indicator, structure, examines the patterns of relationships between the actors involved. The fourth indicator, institutionalization, is assessed as the organizing institution or organization. The fifth indicator, rules of behavior, concerns the procedural and behavioral constraints on actors. The sixth indicator, power relations, is related to collaboration in actor interactions, and the seventh indicator, actor strategies, refers to the methods used to achieve goals. The findings show that even though a collaborative network has been formed, there are still obstacles in terms of unequal power distribution, a lack of cross-sectoral network institutionalization, and a low level of understanding of technical policy rules at the local level. This study concludes that in order to achieve the goals of integrated and sustainable Minapolitan area development, it is necessary to strengthen institutional synergy, increase the capacity of local actors, and restructure policy networks in an inclusive manner.

Keywords: *policy network, Minapolitan, area development, fisheries.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Provinsi Riau, melalui pendekatan *policy network*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Minapolitan melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor: pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM, dan akademisi. Penelitian ini menggunakan tujuh dimensi dari Van Waarden untuk mengkaji jaringan kebijakan, meliputi: aktor yang meliputi individu maupun kelompok dan memiliki kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Indikator ke dua, yaitu fungsi menyangkut peran aktor dalam jaringan kebijakan. Ketiga, struktur melihat bagaimana pola hubungan antara aktor yang terlibat. Keempat, Pelembagaan dinilai sebagai institusi atau organisasi penyelenggara. Indikator kelima, aturan perilaku sebagai batasan prosedur dan tindakan aktor. Keenam, Hubungan kekuasaan dikaitkan dengan kolaborasi dalam interaksi aktor, dan indikator ketujuh yakni, strategi aktor menunjukkan pada cara – cara yang digunakan dalam mencapai tujuan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah terbentuk jejaring kolaboratif, masih terdapat hambatan dalam hal distribusi kekuasaan yang belum merata, kurangnya pelembagaan jaringan lintas sektor, dan rendahnya pemahaman terhadap aturan teknis kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan Minapolitan yang integratif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aktor lokal, dan penataan ulang struktur jaringan kebijakan secara inklusif.

Kata Kunci: *policy network, Minapolitan, pengembangan kawasan, perikanan.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Salah satu subsektor yang memiliki potensi strategis adalah budidaya perikanan, yang menurut (Dauhari, 2005) memiliki estimasi nilai mencapai USD 82 miliar per tahun. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tereksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2010 dan Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2010.

Sub sektor budidaya perikanan merupakan potensi ekonomi yang besar di bidang kelautan dan perikanan di Indonesia. Namun, belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut laporan dari Kementerian kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budidaya seluas 17,91 juta Ha, tetapi pemanfaatan lahannya masih mencapai 6%. Hal ini menyebabkan pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ini melalui pengembangan kawasan minapolitan.

Konsep Minapolitan merupakan bagian dari pendekatan pembangunan berbasis wilayah, khususnya agropolitan, yang fokus pada pengembangan kawasan dengan potensi perikanan, baik perikanan budidaya maupun tangkap. Minapolitan mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas perikanan serta pelayanan jasa penunjang dalam satu kesatuan sistem. Prinsip-prinsip yang melandasi konsep ini adalah integrasi, efisiensi, percepatan, dan keberlanjutan. Hingga saat ini, sebanyak

178 kabupaten/kota di 33 provinsi telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan.

Salah satu kawasan yang termasuk dalam program Minapolitan adalah Kecamatan XIII Koto Kampar di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Wilayah ini dikenal memiliki potensi besar dalam budidaya ikan air tawar, terutama ikan patin. Luas lahan untuk budidaya mencapai 6.111,3 hektar, namun yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 14,13%. Produksi tahun 2021 mencapai hampir 57 ribu ton, namun pemanfaatan sarana dan prasarana belum maksimal. Ironisnya, jumlah rumah tangga pembudidaya di Riau, khususnya di Kampar, cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2020 menjadi titik terendah dengan pertumbuhan 0,9% akibat pandemi, namun kembali meningkat menjadi 4,83% pada tahun 2022. Sektor ekonomi unggulan masih bertumpu pada pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Padahal, dengan adanya kawasan Minapolitan, diharapkan sektor perikanan juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Namun, implementasi kebijakan Minapolitan di Kampar belum optimal. Terdapat sejumlah tantangan, di antaranya: Terbatasnya infrastruktur seperti irigasi dan akses jalan. Keterbatasan modal dan akses pembiayaan, Rendahnya kapasitas SDM pembudidaya, Permasalahan pencemaran limbah dari aktivitas domestik dan pertanian, Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif melalui pemanfaatan policy

network. Teori jaringan kebijakan menekankan pentingnya hubungan kolaboratif antar aktor dari berbagai sektor, baik pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, hingga LSM. Model ini menggantikan model top-down tradisional dalam kebijakan publik, dengan memperkuat proses negosiasi, kerjasama, dan koordinasi antar aktor.

Beberapa penelitian terdahulu (Anto, 2018; TM et al., 2021) telah menunjukkan bahwa pendekatan jaringan dalam implementasi kebijakan Minapolitan mampu meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan XIII Koto Kampar, inisiatif Minapolitan telah memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, efektivitasnya masih terganjal oleh lemahnya solidaritas sosial dan konektivitas antar aktor, sebagaimana dikemukakan oleh (Sumule, 2020).

Selain itu, kendala seperti kurangnya dukungan teknologi, minimnya pelatihan dan penyuluhan, serta lemahnya peran koperasi juga turut menghambat optimalisasi kawasan ini. Data dari UPT Sentra Pengolahan Ikan Patin menunjukkan bahwa dari 30-ton ikan patin yang masuk setiap minggu, terdapat 3-ton limbah yang belum dikelola dengan baik. Ini menjadi isu penting yang harus diatasi secara kolektif oleh aktor-aktor kebijakan di tingkat lokal.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji kembali efektivitas implementasi kebijakan Minapolitan melalui pendekatan *policy network*. Penelitian ini akan mengidentifikasi peran, relasi, dan posisi aktor dalam jaringan kebijakan serta sejauh mana koordinasi dan kolaborasi telah terbentuk. Dengan memetakan struktur jaringan dan mengevaluasi hubungan antar elemen kebijakan, dapat ditemukan

solusi strategis dalam memperkuat tata kelola perikanan berbasis kawasan.

Lebih jauh, pemahaman terhadap dinamika jaringan kebijakan menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi kebijakan publik yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Pendekatan ini juga mendorong pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, sehingga tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut muncul pertanyaan dari penelitian ini : bagaimana dimensi *policy network* dalam implementasi kebijakan kawasan minapolitan di XIII Koto Kampar.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dimensi *policy network* dalam implementasi kebijakan kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat sinergi antar aktor serta mempercepat pembangunan kawasan berbasis potensi perikanan lokal di Provinsi Riau.

Tinjauan Pustaka

Perspektif Governance

Teori *governance* lahir sebagai respons atas perubahan nilai-nilai dalam birokrasi pemerintahan, yang kemudian dipengaruhi oleh prinsip-prinsip manajemen sektor swasta melalui paradigma *New Public Management* (NPM). Perkembangan ini menandai pergeseran dari pendekatan pemerintah yang hierarkis ke arah pengambilan keputusan yang lebih kolektif dan partisipatif dengan melibatkan tiga aktor utama: pemerintah (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*), termasuk organisasi non-pemerintah (NGO).

Dalam konteks administrasi publik, *governance* telah menjadi pendekatan penting yang tidak hanya mencakup manajemen publik dan jaringan kebijakan (*policy networks*), tetapi juga mencakup konsep kemitraan publik-swasta, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), hingga *good governance*—yang sering dijadikan standar oleh lembaga-lembaga donor internasional.

Governance menekankan perlunya sinergi antara semua pihak untuk menyelesaikan masalah publik secara bersama-sama. Pemerintah menciptakan lingkungan hukum dan politik yang kondusif, sektor swasta menyediakan lapangan kerja dan pendapatan, sementara masyarakat berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pengawasan.

Menurut *Stoker*, terdapat lima proposisi utama dalam *governance*:

1. Melibatkan berbagai institusi dan aktor dalam pengambilan keputusan,
2. Menghapus batas kaku antara peran dan tanggung jawab dalam isu sosial dan ekonomi,
3. Menyiratkan adanya saling ketergantungan antar lembaga,
4. Mendorong *self-governing* atau pengelolaan mandiri oleh aktor non-negara,
5. Tidak selalu mengandalkan pemerintah melalui kewenangannya untuk menyelesaikan masalah publik.

Menurut definisi UNDP, *governance* adalah praktik pengelolaan kekuasaan ekonomi, politik, dan administratif dalam suatu negara yang melibatkan mekanisme dan institusi tempat warga menyampaikan aspirasi, menggunakan hak, serta menyelesaikan perbedaan. Karakteristik *good governance* menurut UNDP meliputi: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, responsivitas, orientasi pada konsensus, kesetaraan, dan

inklusivitas. Seiring waktu, nilai-nilai *governance* berkembang dalam paradigma administrasi publik:

Tabel 1.
Proses evolusi nilai – nilai dalam Administrasi Publik seiring dengan berkembangnya konsep *governance*

Paradigma	Model Governance	Nilai Administrasi Publik
<i>Traditional Public Administration (TPA)</i>	<i>Top-Down Governance</i>	Efisiensi
<i>New Public Administration (NPA)</i>	<i>Participatory Governance</i>	Keadilan
<i>New Public Management (NPM)</i>	<i>Performance-Based Governance</i>	Efisiensi, Efektivitas, Kualitas (<i>Three E's</i>)
<i>Public Value Management (PVM)</i>	<i>Network Governance</i>	Efisiensi, Keadilan, Tanggung Jawab

Sumber: Lie (2017) dalam Danar, O. R., AP, S., & AP, M. (2022).

Jaringan Kebijakan (*policy network*)

Teori Jaringan Kebijakan (*policy network*) muncul pada abad ke 20 yang merupakan konsep penting dalam administrasi publik yang menggeser fokus dari hierarki tradisional menuju partisipasi dan pembagian nilai (*sharing value*) antar aktor dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan kebijakan. Konsep ini mengakui bahwa seluruh proses kebijakan – mulai dari formulasi, implementasi, monitoring, hingga evaluasi – adalah hasil interaksi kompleks antar aktor yang terlibat. Para pemikir seperti (Rhodes & Marsh, 1992) serta Klijn dan Koppenjan (2000) mengenalkan bahwa *policy network* sebagai kerangka analisis baru untuk

menjawab bahwa pentingnya kerjasama, negosiasi, dan ketergantungan sumber daya antar aktor pemerintah, swasta, dan Masyarakat sipil.

Aktor-aktor dalam Jejaring Kebijakan: Awalnya, diidentifikasi tiga aktor utama dalam tata kelola administrasi publik: Pemerintahan (*state*), Swasta (*private*), Masyarakat (*civil society*). Ketiganya membentuk "segitiga besi" (*iron triangle*) yang dikenal dengan *good governance*. Namun, kemudian muncul konsep *sound governance* yang menambahkan aktor keempat, yaitu aktor internasional (*international actors*) yang juga berpengaruh dalam penyelenggaraan negara dan tata kelola kebijakan. Artinya, tata kelola pemerintahan yang kuat harus memperhatikan kepentingan keempat aktor ini. Aktor-aktor ini dapat berupa eksekutif, legislatif, yudikatif, serta dari lingkungan swasta dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Secara teoritis, *policy network* berakar pada dua teori utama yakni *interorganizational theory* dan *resource dependency theory*. Seiring perkembangannya, teori *policy network* dianggap sebagai kerangka yang relevan dan adaptif dalam memahami dinamika kebijakan kontemporer. Sehingga, *policy network* tidak hanya menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat, namun bagaimana proses kebijakan ini mencerminkan hubungan sosial, pertukaran kekuasaan, dan struktur interpedensi diantara aktor – aktor publik dan non publik dalam sistem pemerintahan yang semakin kolaboratif (Klijn & Koppenjan, 2000). Karakteristik Jejaring Kebijakan: Menurut (Enroth, 2011), karakteristik jejaring kebijakan meliputi:

a. Pluralisme: Terbentuk dari komposisi keberagaman aktor, sektor, kepentingan, strategi, sumber daya, dan kekuatan.

- b. Interdependensi: Hubungan saling ketergantungan antar aktor adalah kunci terbentuknya jejaring.
- c. Kedudukan yang setara atau kemitraan.
- d. Intersubjektivitas: Setiap aktor memiliki interpretasi berbeda dalam menerjemahkan visi kebijakan sesuai pengalaman dan kepentingannya.
- e. Otonomi: Aktor bersifat otonom dan dapat bergabung atau berpisah kapan saja.
- f. Lintas batas: Interaksi antar aktor tidak dibatasi ruang dan waktu.

Jejaring sendiri didefinisikan sebagai struktur formal dan informal yang menghubungkan aktor-aktor yang berbagi kepentingan dan nilai bersama mengenai persoalan publik. Kickert (dalam Ilhami, 2023) menyatakan bahwa jejaring adalah karakteristik fundamental masyarakat modern. Peran dan Fungsi Jejaring Kebijakan: Jejaring kebijakan merupakan mekanisme tata kelola dan pendekatan penting dalam studi kebijakan publik yang menekankan interaksi berbagai aktor dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Jaringan ini mempermudah perumusan, memperlancar implementasi, dan mengevaluasi apakah kebijakan telah sesuai dengan kepentingan publik.

Kolaborasi adalah aspek kunci dari teori jejaring kebijakan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk masalah kebijakan yang kompleks. Struktur jaringan yang tepat dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik, bahkan meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan efektivitas kebijakan publik melalui jaringan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Jejaring kebijakan juga membantu mengatasi tantangan implementasi kebijakan publik lintas sektor.

Tantangan dalam Jejaring Kebijakan: Meskipun penting, jejaring

kebijakan yang terorganisir sendiri dapat menghadapi dilema tindakan kolektif yang kompleks, memerlukan pemilihan mitra yang tepat dan strategi kolaborasi yang efektif. Pemahaman karakteristik struktural dan evolusi jaringan kolaboratif juga krusial untuk efektivitas kebijakan.

Jenis-jenis Jejaring Kebijakan: Menurut Marsh dan Rhodes (dalam Yu et al., 2022), ada lima kategori utama jejaring kebijakan:

1. Komunitas Kebijakan: Kumpulan aktor stabil dengan kepentingan sama, seringkali melibatkan pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, dan ahli. Ditandai oleh kepercayaan dan saling pengertian.
2. Jaringan Profesional: Individu dan organisasi yang berbagi keahlian dan pengetahuan, penting untuk inovasi dan penyebarluasan praktik terbaik.
3. Jaringan Antar Pemerintah: Kolaborasi antar berbagai tingkat pemerintahan (lokal, regional, nasional) untuk mengatasi masalah kompleks lintas yurisdiksi.
4. Jaringan Produsen: Organisasi dan individu yang terlibat dalam produksi dan pengiriman barang/jasa, membentuk kebijakan dan praktik ekonomi.
5. Jaringan Isu: Interaksi cair dan dinamis antar pemangku kepentingan yang berkumpul untuk mengatasi masalah kebijakan tertentu, seringkali sementara dan melibatkan berbagai aktor.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator Frans Van Waarden (Waarden, 1992), (Pujianti et al., 2022) yaitu:

1. Aktor
Aktor dalam kebijakan bukan hanya individu tetapi bisa berupa organisasi karena aktor yang terlibat merupakan

representasi dari kelompok/partai tertentu.

2. Fungsi
Konsep fungsi membentuk tautan perspektif antara struktur dan aktor dalam jaringan. Fungsi utama dari jaringan adalah sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan (relasi) antara pihak – pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik baik pada tahap perumusan maupun implementasinya
3. Struktur
Struktur jaringan kebijakan mengacu pada pola hubungan antara aktor yang terlibat
4. Pelembagaan
Hal ini mengacu pada karakter formal dari struktur jaringan dan stabilitasnya. Tingkat pelembagaan akan tergantung pada karakteristik structural jaringan. Dengan demikian, pelembagaan akan cenderung lebih besar pada jaringan yang tertutup, dengan keanggotaan bersifat wajib, hubungan yang teratur, intensitas yang tinggi, keragaman dan simetri hubungan, keanggotaan yang tumpang tindih, dan kepemimpinan yang saling terkait, dan dengan unit kebijakan pusat.
5. Aturan perilaku
Jaringan juga dicirikan oleh konveksi interaksi atau “aturan main”, yang mengatur pertukaran dalam jaringan. Aturan – aturan tersebut berasal dari persepsi peran, sikap, kepentingan, latar belakang sosial dan intelektual Pendidikan para aktor yang berpartisipasi, dan kemungkinan besar akan mempengaruhi hal tersebut.
6. Hubungan kekuasaan
Jaringan biasanya merupakan hubungan kekuasaan, dan karenanya dicirikan oleh distribusi kekuasaan, yang tentu saja merupakan fungsi dari

distribusi sumber daya dan kebutuhan di antara para aktor, struktur organisasi bersama. Kekuasaan dalam hubungan bisnis-negara dipengaruhi oleh ukuran organisasi, tingkat sentralisasi atau fragmentasi, atau monopoli representasional.

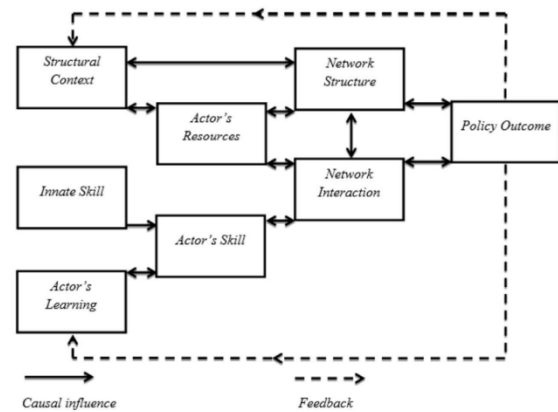
7. Strategi aktor

Para aktor mengikuti strategi baik terhadap jaringan maupun di dalam jaringan itu sendiri. Mereka menciptakan dan/atau menggunakan jaringan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan tujuan mereka, dan mengembangkan strategi untuk mengelola saling ketergantungan.

Dimensi ini yang mendasari hubungan negara dan bisnis. Dalam perkembangannya, Van Waarden mengoperasionalkan jenis hubungan negara/bisnis dalam jaringan kebijakan berfokus pada tiga dimensi: jumlah dan jenis aktor yang terlibat, fungsi utama jejaring, dan keseimbangan kekuatan dalam jejaring.

Model Dialektis: (Marsh & Smith, 2000) mengenalkan model dialektis sebagai analisis jaringan kebijakan, yang menjelaskan bahwa tidak hanya aktor, hubungan antar aktor, dan kepentingan mereka yang penting, tetapi juga perlu adanya transformasi jaringan. Model ini (Gambar 1.) menunjukkan hubungan timbal balik antara struktur dan agensi, jaringan dan konteks, serta jaringan dan hasil kebijakan.

Gambar 1.
Policy Network and Policy Outcome: A Dialectical Approach



Kerangka Konseptual Jaringan Kebijakan: Kerangka konseptual jaringan kebijakan menekankan pentingnya aspek material dan ideasional dari proses pertukaran. Pertukaran material meliputi saling ketergantungan (sumber daya berwujud, interaksi), dimensi fisik (aliran informasi, kolaborasi, kepercayaan), dan dinamika kekuasaan melalui sentralitas aktor. Pertukaran ideasional merujuk pada penyebaran ide oleh pembuat kebijakan untuk memperluas jaringan. Secara keseluruhan, teori jejaring kebijakan memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika interaksi berbagai aktor dalam pembuatan dan implementasi kebijakan, menekankan kolaborasi dan struktur jaringan yang efektif untuk kebijakan yang lebih responsif dan efektif. Peneliti melihat ada setidaknya dua pembaharuan yang ada dalam tulisan ini. Pertama, penelitian ini akan mengembangkan dan menguji dimensi *policy network* yang spesifik untuk kawasan minapolitan, yang mengintegrasikan teori dan praktik dari sektor perikanan. Sebelumnya, *policy network* sering kali bersifat umum atau diterapkan pada sektor lain tanpa penyesuaian untuk konteks khusus kawasan minapolitan. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi dan

mengidentifikasi mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam policy network minapolitan, termasuk cara-cara baru yang belum banyak diteliti dalam literatur tentang pengelolaan kawasan perikanan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang mempunyai tujuan untuk menganalisa secara mendalam terhadap suatu fenomena. Creswell (2012) dalam (Fadli, 2021) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Tahapan pertama yakni melibatkan kajian literatur dan selanjutnya pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi. Metode pengumpulan data primer yakni menggunakan survey lapangan dan data sekunder diperoleh dari tinjauan literatur.

Lokasi Penelitian yakni di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat pengembangan kawasan Minapolitan.

Gambar 2
Peta Lokasi Penelitian



Penelitian ini melibatkan berbagai aktor dari tingkat nasional hingga lokal, termasuk:

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Jenis Informan
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
3	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar
4	Pemerintahan desa Koto Mesjid XIII Koto Kampar
5	Kelompok Pembudidaya ikan (pokdakan)
6	Koperasi dan kelompok usaha bersama
7	Pelaku UMKM dan dan pengolah hasil perikanan
8	Perusahaan dalam bentuk CSR (aktor swasta)
9	Lembaga peneliti (Aktor akademisi)
10	LSM/NGO (Non-Governmental Organization) Lokal dan Nasional

Hasil dan Pembahasan

1. Dimensi Policy Network Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di XIII Koto Kampar

Kampar memiliki potensi hasil produksi perikanan budidaya yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Menurut data BPS tahun 2023, Kabupaten Kampar pada tahun 2022 hasil produksi perikanan pembesaran budidaya berjumlah 65.168 ton, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 56.986 ton. Melihat potensi besar ini, maka secara politik dan kelembagaan kawasan minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar mendapat dukungan dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu hendaknya menganalisis bagaimana dimensi – dimensi policy network dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Desa Koto Mesjid,

Kecamatan XIII Koto Kampar. Berdasarkan indikator Van Warden dalam (Pujianti et al., 2022) ada tujuh dimensi jaringan kebijakan, yaitu :

Aktor

Sub dimensi pertama untuk kategori aktor ini adalah jumlah partisipan. Pada pengembangan kawasan Minapolitan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 18/Men/2012 tentang Minapolitan menjelaskan bahwa minapolitan adalah konsepsi Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Berdasarkan prinsip integrasi tersebut dimaknai bahwa pengalokasian sumber daya Pembangunan dilaksanakan secara holistik dengan dukungan stakeholder, baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah, kalangan dunia usaha, maupun masyarakat.

Percepatan hasil produksi dan dukungan untuk sarana produksi, permodalan, teknologi, sumber daya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang tepat adalah hal-hal yang penting yang perlu mendapat dukungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kawasan minapolitan Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar menunjukkan bahwa adanya keterlibatan beberapa aktor dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Berikut jenis aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar dan sebagai berikut, ;

1) Dinas Perikanan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan UPTD Pengolahan Dinas Perikanan, keterlibatannya dalam regulator dan fasilitator, dan sebagai sentra pengembangan perikanan di Desa Koto Mesjid

- 2) Dinas Perdagangan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, sebagai pembinaan terhadap UMKM terutama dalam peningkatan daya saing dan pendanaan UMKM.
- 3) Dinas Kesehatan, yang memberikan perizinan UMKM desa Koto Mesjid agar kualitas dari produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum adalah instansi yang berkontribusi dalam Pembangunan infrastruktur akses pelaksanaan program minapolitan
- 5) Kepala Desa yang akan memberikan koordinasi secara lokal dalam hal pemberdayaan masyarakat
- 6) Kelompok pembudidaya sebagai pelaksana teknis dan memberikan kepentingan dalam hal peningkatan ekonomi
- 7) Penyuluh Perikanan sebagai pendamping teknis untuk memberikan ilmu pengetahuan bagaimana membudidaya ikan yang baik dan benar
- 8) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan maupun sosial
- 9) Kehadiran sektor swasta melalui CSR (corporate social responsibility) nya seperti PT. Pertamina Hulu Rokan, PT. Telkom Indonesia
- 10) Akademisi yang berperan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seperti hadirnya Sekolah Tinggi Pariwisata memberikan dampak positif dalam pemberdayaan kepada para pembudidaya ikan di Desa Koto Mesjid.

Karakter jaringan kebijakan sangat dipengaruhi oleh jenis aktor yang terlibat. Aktor dalam jaringan kebijakan tentu saja individu, namun karena Sebagian besar anggotanya berperan sebagai perwakilan organisasi, maka aktor jaringan juga dianggap sebagai organisasi, Warden

dalam (Tardiyo, 2020). Pembentukan jejaring kebijakan di Indonesia diawali dari kemunculan aktor kebijakan yang memiliki ragam nilai atau kepentingan, (Suwitri, 2023). Semakin banyak kepentingan aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan maka akan semakin besar koalisi baik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil penelitian di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, menunjukkan bahwa jejaring aktor sudah terbentuk melalui surat Keputusan Bupati Kampar No. 2406 Tahun 2009 tentang susunan Keanggotaan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) pengembangan kawasan minapolitan Kampung Patin, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Fungsi

Dalam jaringan kebijakan (policy network) fungsi berkaitan dengan kebutuhan, niat, sumber daya, dan strategi para aktor yang terlibat. Jaringan adalah saluran komunikasi, yang dapat menjalankan berbagai fungsi, baik secara sendiri – sendiri maupun bersamaan, menurut Van Warden dalam Pujianti, F,2023). Pemerintah adalah aktor utama yang memiliki fungsi untuk bertanggungjawab pada implementasi pengembangan kawasan minapolitan di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Pada peraturan ini dijelaskan bagaimana fungsi dan kedudukan dari perangkat daerah dalam hal ini Bupati/Walikota menyusun rencana induk yang akan diimplementasikan melalaui rencana perusahaan dan rencana tindak. Pada penyusunan rencana ini hendaknya pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya. Hasil penelitian di kawasan

minapolitan Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, sudah menjalan kan fungsi tersebut dengan membangun kolaborasi bersama sejumlah stakeholder, baik dari Perusahaan swasta, akademisi, dan Lembaga swadaya masyarakat.

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan ini merupakan sentra budidaya perikanan darat yang terintegrasi di Provinsi Riau dengan komoditi unggulannya adalah ikan patin. Desa Koto Mesjid yang dikenal dengan kampung patin merupakan contoh pertanian ikan air tawar dari hulu ke hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya fungsi dari akses ke proses pengambilan Keputusan, pertukaran informasi, pertukaran sumber daya, koordinasi, serta kerjasama dalam implementasi program. Desa Koto Mesjid telah menunjukkan pelaksanaan fungsi tersebut melalui kehadiran PT. Pertamina Hulu Roka, PT. Telkom.

Berdasarkan penelitian (Fajri & Yuliani, 2014) menyatakan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Kampar menjalin kerjasama dengan investor dalam negeri maupun luar negeri karena melihat adanya peluang yang prospektif pada potensi wilayah.

Hasil wawancara dengan petani ikan patin, bapak suhaimi menyampaikan bahwa

“Awalnya saya dulu hanya meminjam milik kolam tetangga, namun berkat kerja keras dan sinergitas dari berbagai pihak maka sekarang bersama masyarakat sudah 150 ha kolam ikan patin, dan sudah diolah dari berbagai makanan cepat saji, hal ini juga berkat bantuan dan binaan pihak PT Pertamina Hulu Rokan”.

Berdasarkan hasil wawancara teersebut dapat dilihat bahwa fungsi dari pihak stakeholder memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan

perekonomian warga melalui budidaya perikanan. Kontribusi yang diberikan lainnya berupa Perusahaan PT. Kamparicom yakni Perusahaan yang dibangun antara pemerintahan Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau beserta PT. Benecom Jakarta, jalinan kerjasama ini bisa menampung hasil produksi dalam skala besar. Selanjutnya (Yantos, 2016) dalam temuannya kehadiran investor yang bergerak dibidang industri perikanan yakni CV. Graha Pratama Fish Namun, bentuk fungsi negosiasi yang dilakukan masih dirasakan terbatas, karena kegiatan pengembangan kawasan minapolitan yakni hulu ke hilirnya membutuhkan banyak Kerjasama dengan berbagai investor. Serta perlunya fungsi media elektronik dalam mempromosikan hasil produksi olahan ikan patin.

Struktur

Menurut Frans Van Warden dalam (Arnouts et al., 2012) struktur mengacu pada pola hubungan yang dilakukan oleh antar aktor.

Tabel 3
Struktur hubungan aktor dalam *policy Network* di kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid

No	Aktor	Peran	Arah hubungan	Batas – Batas Keanggotaan	Sifat hubungan
1	Pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait	Penentu arah kebijakan teknis perizinan, perencanaan wilayah, pembinaan	Top down	Tertutup	Kooperatif
2	Penyuluh perikanan lapangan	Fasilitator/ penghubung	Dua arah	Terbuka	Kooperatif
3	Kelompok pembudidaya	Pelaksana Teknis	Bottom up	Terbuka	Kooperatif
4	Kelompok UMKM pengolah dan pemasar (poklasar) ikan	Mengolah ikan dan memasarkan produk	Horizontal	Terbuka	Kooperatif
5	Perusahaan (CSR) dan investor	Fasilitator dalam mengembangkan UMKM di desa Koto Mesjid	Horizontal	Terbuka	kooperatif

Sumber : olahan peneliti

Berdasarkan tabel 3 diatas kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Desa Koto Mesjid,

Kecamatan XIII Koto Kampar sudah menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang dan diatur dalam tugas pokok dan fungsi dan secara struktur organisasinya sudah menunjukkan saling mendukung satu sama lain. Namun dari hasil penelitian perlu adanya struktur lembaga keuangan dalam hal pemberian permodalan kepada kelompok pembudidaya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan dari program Minapolitan ini.

Senada dengan penelitian (Faridzi & Mulyana, 2024) bahwa dalam pengembangan usaha budidaya patin di Desa Koto Mesjid memperoleh permodalan dari pinjaman bank, koperasi lokal, seperti (koperasi perikanan, koperasi desa, dan koperasi BUMDes, program CSR dari Perusahaan swasta. Hal ini tentunya dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembudidayaan yang mereka lakukan. Seperti yang disampaikan oleh (Ondang et al., 2019), pemerintah hendaknya menjalin kemitraan dengan bank, koperasi, serta pihak luar dalam menyediakan pinjaman lunak, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat meningkatkan daya saing produk usaha masyarakat.

Pelebagaan

Tingkat pelembagaan akan tergantung dari karakteristik struktur jaringan. Pelebagaan akan cenderung lebih besar pada jaringan yang tertutup, dengan kenagggotaan bersifat wajib, hubungan yang teratur, intensitas yang tinggi, keragaman dan simetri hubungan, keanggotaan yang tumpang tindih dan kepemimpinan yang saling terkait, dan dengan unit kebijakan pusat, Van Waarden dalam (Zuhdi, S., Sos & Saputra, 2025). Aspek pelembagaan pada kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto

Kampar disimpulkan cukup optimal. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sudah berperan strategis dalam membentuk kelompok – kelompok pembudidaya, melakukan pelatihan, penyuluhan, pembinaan dan memperkuat kelompok – kelompok dengan munculnya sertifikasi guna meningkatkan kualitas produk olahan ikan patin.

Namun pelembagaan jaringan terkait kehadiran forum – forum seperti musyawarah desa dan pertemuan lintas sektor, namun belum ada Lembaga yang mengatur jaringan kerja antar aktor tersebut dalam kerangka kebijakan Minapolitan. Seiring dengan penelitian (Pujianti et al., 2022) menyatakan bahwa jika aturan formal yang dikeluarkan pemerintah mengenai pelaksanaan program, dimana masing – masing institusi memiliki SOP nya tersendiri, maka koordinasi yang dijalankan akan kurang jelas dan saling melempar pelaksanaan program.

Aturan Perilaku

Aturan perilaku dalam jaringan bisa bersifat informal, karena dibentuk dari kebiasaan interaksi, latar belakang budaya lokal, serta persepsi peran dari masing – masing aktor. Terdapat sejumlah aturan formal tentang pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan. Pada level Pemerintah Daerah, kebijakan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagai berikut. (1) Keputusan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 050/Bappeda/174/2009 tentang Penetapan Kecamatan XIII Koto Kampar sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Kampar. (2) Keputusan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 138 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Kampar. (3) Keputusan Bupati

Kabupaten Kampar Nomor 2406 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Minapolitan Kampung Patin Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan pada level Pemerintah Pusat tertuang dalam bentuk kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai berikut. (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. (3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Implikasi kebijakan yang muncul lahir melalui pendekatan *bottom up* untuk menjadi produk hukum atau konsensus yang harus diimplementasikan oleh aktor-aktornya. Aturan aturan ini menjadi acuan utama dalam kegiatan teknis, namun belum sepenuhnya di pahami oleh seluruh aktor lokal, terutama pelaku UMKM dan pembudidaya ikan patin.

Hubungan kekuasaan

Jaringan kekuasaan merupakan hubungan kekuasaan, dan dicirikan oleh distribusi kekuasaan. Dalam hubungan bisnis – negara kekuasaan dipengaruhi oleh ukuran organisasi, tingkat sentralisasi atau fragmentasi, atau monopoli representasional, Waarden, dalam Zuhdi, 2025. Hubungan kekuasaan dalam jaringan kebijakn pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar masih terdistribusi secara asimetris. Dinas Perikanan dan Bappeda Kabupaten Kampar mendominasi di tingkat pemerintahan, dan memegang otoritas

perencanaan dan penganggaran. Di tingkat desa sebagai pelaksana kebijakan, dan belum memiliki ruang yang cukup dalam perumusan kebijakan strategis. Kehadiran PT. Pertamina Hulu Rokan, PT. Telkom, PT PLN sebagai aktor non pemerintah melalui Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh kuat ditingkat lokal. Bentuk aktivitasnya adalah keterlibatan dalam pengembangan wisata kampung patin, pelatihan, Pembangunan infrastruktur, bantuan modalan. Hal ini merupakan sumber kekuasaan berbasis modal dan kepercayaan masyarakat. Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan terutama aspek lingkungan dan sosial.

Strategi aktor

Jaringan kebijakan telah dipelajari dari perspektif sektor swasta dan strateginya, (Lehmburch, 2019). Strategi sering dicirikan sebagai pembangunan struktur, yakni memodifikasi struktur yang ada, atau menciptakan struktur baru. Dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar menjalankan strategi yang menunjukkan saling ketergantungan antar aktor, walaupun belum simetris. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kampar menggunakan strategi *top – down strategic control*, dengan menetapkan kebijakan, program teknis, serta penyaluran bantuan melalui mekanisme birokrasi yang terstruktur. Perlu hendaknya strategi dari aktor dinas terkait lainnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Pemerintah Desa Koto Mesjid menerapkan strategi kolaboratif dan adaptif dan menjalin kemitraan dengan Perusahaan swasta, LSM, dan Kelompok Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya strategi akses pasar melalui digitalisasi dalam memasarkan produk olahan ikan patin di Desa Koto Mesjid, agar hasil olahan ini dapat diakses oleh jaringan pasar Internasional.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM, dan akademisi. Jaringan kebijakan yang cukup kompleks muncul dari keterlibatan ini. Berdasarkan tujuh dimensi Van Waarden, jaringan ini dapat digunakan untuk pertukaran informasi, koordinasi, dan pembagian peran. Namun, jaringan ini masih menghadapi masalah dalam hal simetri kekuasaan, pelembagaan koordinasi lintas sektor, dan bagaimana aktor lokal memahami aturan teknis. Baik pemerintah maupun LSM menggunakan pendekatan top-down atau kolaboratif dan pemberdayaan. Untuk mencapai tujuan integrasi dan keberlanjutan program Minapolitan, jaringan kebijakan ini masih membutuhkan penguatan kelembagaan, distribusi kekuasaan yang lebih adil, dan peningkatan kapasitas lokal. Ini terjadi meskipun kemajuan dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan telah dicapai.

Daftar Pustaka

Arnouts, R., van der Zouwen, M., & Arts, B. (2012). *Analysing governance modes and shifts - Governance arrangements in Dutch nature policy.*

- Forest Policy and Economics*, 16, 43–50.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.04.001>
- Dauhari, R. (2005). Potensi Ekonomi Kelautan. *Republika*.
- Enroth, H. (2011). *Policy network theory*. The SAGE handbook of governance.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fajri, V. wati, & Yuliani, F. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu ...*, 1–14.
- Faridzi, M. A., & Mulyana, M. (2024). Pemberdayaan Petani Ikan Patin Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 161–180.
- Ilhami, R. (2023). Policy Network Management in Tourism Sector Policy. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(02), 199–207.
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/3123>
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/download/3123/2460>
- Lehmburch, G. (2019). The Organization of Society, Administrative Strategies, and Policy Networks. *Organization of Society, Administrative Strategies, Policy Networks*, 1–9.
- Marsh, D., & Smith, M. (2000). *Understanding Policy Networks : towards a Dialectical Approach*. 4–21.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Pujianti, F., Muhtar, E. A., & Setiawan, T. (2022). Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Melalui Perogram Perlindungan Dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 457.
<https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41373>
- Rhodes, R. A. W., & Marsh, D. (1992). New directions in the study of policy networks. *European Journal of Political Research*, 21(1–2), 181–205.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1992.tb00294.x>
- Sumule. (2020). *Pemetaan dan Analisis Minapolitan Kota Pekalongan Pemetaan dan Analisis Jaringan Inovasi Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap di Kota Pekalongan*.
- Suwitri, S. (2023). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang. *Elgar Encyclopedia of Political Sociology*, VI(3), 359–362.
<https://doi.org/10.4337/9781803921235.00097>
- Tardiyo, D. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 7(2)*, 262–263.
file:///C:/Users/A S U S/Downloads/Documents/3067-13605-1-PB_2.pdf
- Waarden, F. Van. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research*, 21, 29–52.
- Yantos. (2016). *Peningkatan Daya Saing Umkm Desa Koto Masjid Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*

(*Mea*). 27(1), 32–45.
Yu, H., Wang, Y., Yin, W., & Li, D. (2022).
*Kebijakan Kelautan Struktur jaringan ,
aktor , dan interaksi.* 140.

Zuhdi, S., Sos, S., & Saputra, T. (2025).
*Jejaring Kebijakan Paradigma Baru
Administrasi Publik.* Widina.
